

BAB II
UPAYA KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM MELAKUKAN
PENAGIHAN UTANG PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP
PENANGGUNG PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SIDOARJO SELATAN

A. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.

Tindakan penagihan pajak dengan Surat paksa dilakukan apabila fiskus telah melakukan tindakan penagihan pajak secara aktif tetapi wajib pajak tidak juga membayar utang pajaknya. Tindakan tersebut merupakan perwujudan dari alat paksa yang dimiliki oleh negara dan yang diatur dalam hukum pajak. Menurut pasal 20 Undang-Undang KUP mengatur bahwa jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu pembayaran pajak yang telah ditentukan ditagih dengan Surat Paksa.

Berdasarkan jumlah tagihan pajak tersebut apabila terdapat tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran wajib pajak tidak melunasi pajak terutang, atau wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihan pajak yang tidak atau kurang bayar tersebut dilakukan dengan Surat Paksa.

Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan tidak hanya terhadap wajib pajak tetapi juga terhadap penanggung pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP diwajibkan untuk ikut bertanggung jawab dalam pembayaran pajak yang terutang. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak tersebut dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa oleh jurusita pajak. Kemudian kedua belah pihak (jurusita pajak dan penanggung pajak) menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada penanggung pajak, sedangkan yang asli disimpan di kantor pejabat yang berwenang dalam melakukan penagihan pajak.

Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;

2. Nama jurusita pajak;
3. Nama yang menerima Surat Paksa; dan
4. Tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Menurut Pasal 10 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :

1. Wajib pajak atau Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain yang memungkinkan;
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
4. Para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Menurut Pasal 10 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :

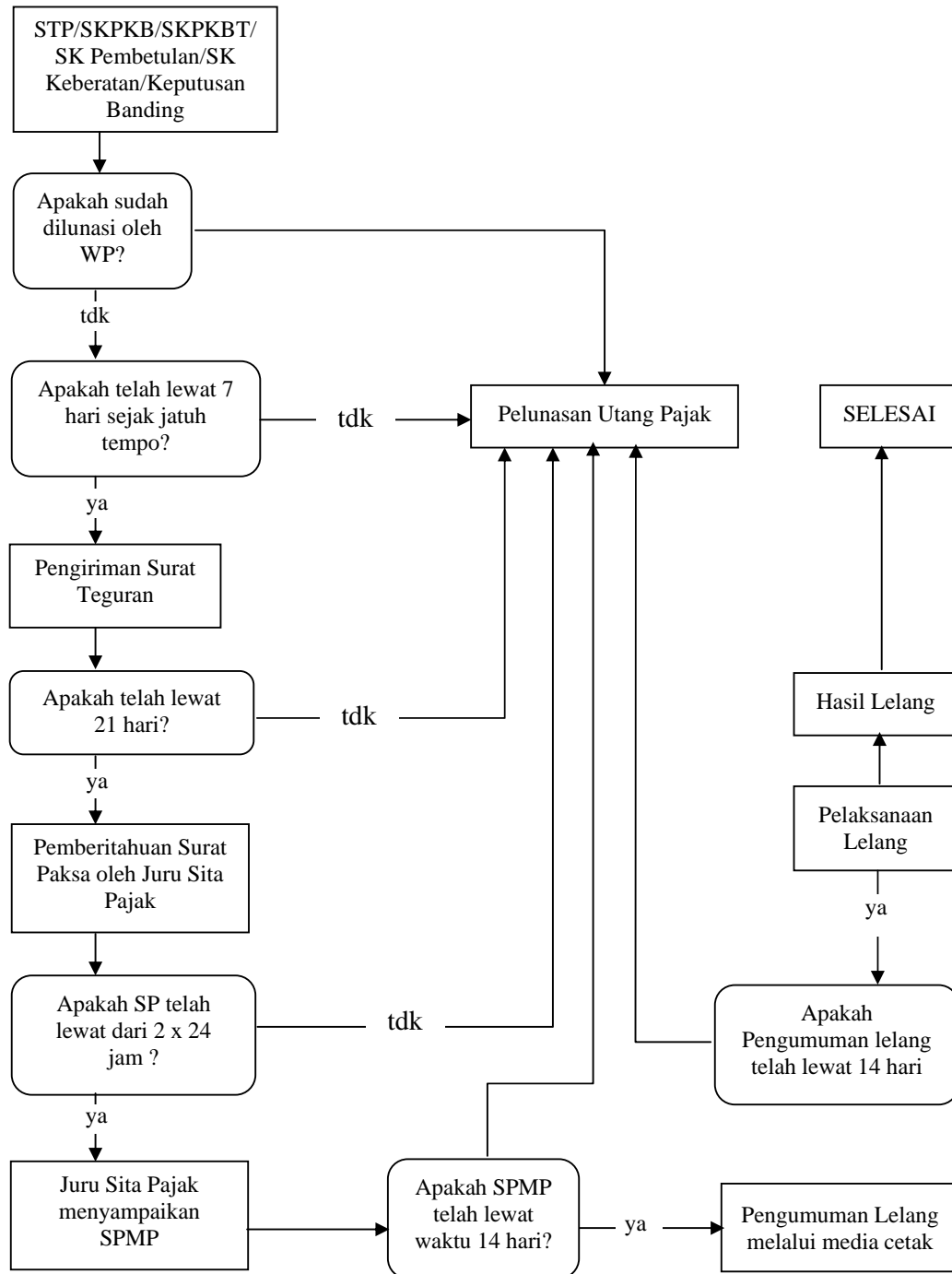
1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan. Dengan demikian pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan dapat disampaikan:
 - untuk perseroan terbatas (PT) kepada pengurus, yang meliputi direksi, komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata

mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. Pengertian komisaris meliputi komisaris sebagai orang yang lazim disebut dewan komisaris dan komisaris sebagai orang yang lazim disebut anggota komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas (PT) terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas (PT) tertutup;

- untuk bentuk usaha tetap kepada kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab;
- untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, firma, dan perseroan komanditer kepada direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud; serta
- untuk yayasan kepada ketua atau orang yang melaksanakan, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas yayasan yang dimaksud; atau

2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pengertian pegawai tetap adalah pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, persoalan, hubungan masyarakat, atau bagian umum, dan bukan pegawai harian.

B. Skema Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak.



(Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan)

Gambar 1

Skema Prosedur Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan

Penjelasan Skema:

Prosedur Penagihan Pajak dimulai dari dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SKP tersebut dikeluarkan berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan dan disusun oleh wajib pajak sendiri yang dikenal dengan istilah *Self Assesment*. Surat pemberitahuan tersebut diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dari hasil pemeriksaan tersebut dikeluarkan terdiri dari berbagai jenis yaitu:

1. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) bagi wajib pajak yang utang pajaknya nihil.
2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) bagi wajib pajak yang pembayaran pajaknya lebih besar dan utang pajaknya. Kelebihan tersebut akan dikembalikan.
3. Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu surat tagihan kepada wajib pajak yang masih mempunyai utang pajak.
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yaitu surat ketetapan pajak yang kurang dibayar oleh wajib pajak.
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yaitu Surat ketetapan pajak

Berdasarkan kelima jenis SKP tersebut hanya STP, SKPKB, SKPKBT yang dilakukan penagihan secara aktif kepada wajib pajak. Setelah lewat jangka waktu temponya dalam STP / SKPKB / SKPKBT, maka proses penagihan aktif dimulai yang dengan cara sebagai berikut :

1. Tindakan pelaksanaan penagihan aktif diawali dengan penerbitan surat teguran atau surat lain yang sejenis oleh pejabat yang berwenang melakukan penagihan pajak (selanjutnya disebut sebagai pejabat) atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya;
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
4. Apabila jumlah utang yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP),
5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang,
6. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, maka pejabat yang berwenang segera melakukan penjualan barang sitaan milik penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara,

7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak dilakukan penyitaan atas barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, maka pejabat yang berwenang segera melakukan penjualan, penggunaan, dan atau pemindahbukuan barang sitaan milik penanggung pajak;
8. Dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dapat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, dan
9. Dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dapat dilakukan tindakan pencegahan dan atau penyanderaan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan izin dari Menteri Keuangan atau gubernur.

Berdasarkan pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus, apabila terdapat wajib pajak/ penanggung pajak yang merasa tidak puas atau dirugikan atas pelaksanaan tindakan penagihan pajak tersebut, maka wajib pajak/ penanggung pajak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap fiskus. Pelaksanaan gugatan terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Gugatan yang dapat diajukan oleh wajib pajak/ penanggung pajak adalah terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), atau Pengumuman Lelang.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan hak kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mengajukan gugatan kepada Badan

Peradilan Pajak apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang. Sesuai dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), gugatan wajib pajak atau penanggung pajak hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak, yang mana berkedudukan di Jakarta. Apabila, gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi yang ditujukan kepada Pejabat Direktorat Jenderal Pajak.

Permohonan ganti rugi diajukan oleh penanggung pajak yang gugatannya dikabulkan pejabat yang berwenang di tempat pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), atau pengumuman lelang dilakukan. Pemulihan nama baik dan ganti rugi yang diberikan hanya dalam bentuk uang. Dan besarnya ganti rugi yang diberikan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah. Menurut Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, bahwa: “Gugatan wajib atau penanggung pajak diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman Lelang dilaksanakan.”

Jangka waktu 14 hari untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Paksa dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak , untuk

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dihitung sejak pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan untuk pengumuman lelang dihitung sejak diumumkan. Dengan demikian, lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 14 hari sejak pengumuman lelang, mengingat dalam jangka waktu tersebut penanggung pajak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Jika dalam jangka waktu yang dimaksud penanggung pajak tidak mengajukan gugatan, hak penanggung pajak untuk menggugat dinyatakan gugur.

Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu pengajuan gugatan tidak mengikat apabila jangka waktu yang dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Apabila batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*), jangka waktu tersebut dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh majelis/ hakim tunggal pengadilan pajak. Perpanjangan jangka waktu pengajuan gugatan adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Dan terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) surat gugatan.

Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterimanya surat, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. Namun, apabila selama proses gugatan penggugat meninggal dunia, gugatan dapat

dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya (dalam hal penggugat pailit).

Gugatan yang disampaikan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Selain tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan penagihan pajak, gugatan tidak menunda atau mengurangi pelaksanaan kewajiban perpajakan penggugat. Namun, penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan Pajak.

Sesuai dengan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat yang berwenang terhadap Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang, dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Namun, apabila permohonan pembetulan ditolak, pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai dengan jangka waktu semula.

Selain dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat yang berwenang, Undang-Undang Perpajakan Indonesia memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan terhadap ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus apabila menurut wajib pajak

terdapat penetapan pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengajuan keberatan merupakan hak wajib pajak yang mempunyai arti dapat digunakan dan dapat pula tidak digunakan. Artinya apabila secara material terjadi kekeliruan dalam penetapan pajak tetapi wajib pajak tidak mengajukan keberatan, wajib pajak dianggap menerima apa yang telah ditetapkan oleh fiskus. Dengan demikian, harus melunasi pajak terutang sesuai dengan surat keputusan tersebut. Karena pengajuan keberatan merupakan hak, wajib pajak harus mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tata cara pengajuan keberatan harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum pemungutan setiap jenis pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, adanya pengajuan keberatan wajib pajak tidak menunda pelaksanaan tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang mengajukan keberatan tetapi tidak melunasi utang pajaknya pada saat jatuh tempo pembayaran. Dalam Pasal 10 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 menyatakan bahwa: “Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.” Selanjutnya dalam Pasal 13 diatur bahwa pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Hal yang sama juga berlaku apabila fiskus melelang barang milik wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak juga melunasi pajak yang terutang. Sedangkan menurut Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa: “Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan.” Hal ini dilakukan

mengingat lelang merupakan tindak lanjut dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Upaya Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak di Kantor pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.

1. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.

Adapun perkembangan jumlah wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan adalah sebagai berikut :

No.	Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak
1.	2005	1.614
2.	2006	1.455
3.	2007	7.944
4.	2008	14.538
5.	2009	17.705

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan)

Tabel 2

Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan pada tahun 2006 mengalami penurunan sebanyak 159 wajib pajak dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2007 mengalami peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 7.944 wajib pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak yang paling signifikan terjadi pada tahun 2008 yaitu, sebanyak 14.538 wajib pajak dan

terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 17.705 wajib pajak.

2. Perkembangan JumlahTunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.

Perkembangan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis Pajak	2005	2006	2007	2008	2009
PPh	5.101	8.818	7.452	9.934	10.780
PPn dan PPnBM	4.531	4.632	7.670	12.550	8.965
Lain-lain	319	641	745	560	635
Jumlah	9.951	14.091	15.867	23.044	20.380

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan)

Tabel 3
Tunggakan Pajak (Dalam Milyar)

Jika diperhatikan, maka dalam tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah tunggakan pajak yang merupakan utang wajib pajak/ penanggung pajak cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penurunan utang pajak oleh wajib pajak/ penanggung pajak yang kemudian menjadi tunggakan pajak tersebut hanya mengalami penurunan pada tahun 2009. Namun, angka penurunan tunggakan pajak tersebut tidak terlalu besar/ signifikan terhadap penerimaan kas negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan. Untuk mengatasi jumlah tunggakan pajak yang meningkat setiap tahunnya, maka perlu dilakukannya tindakan optimalisasi dalam pelaksanaan penagihan pajak secara tepat waktu dan tuntas hingga pelunasan utang pajak oleh wajib

pajak/ penanggung pajak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Jumlah Target Penerimaan Kas Negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.

Adapun target penerimaan kas negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahun	Target Penerimaan Kas Negara
2005	Rp. 1.893.575.874
2006	Rp. 2.197.654.453
2007	Rp. 2.375.675.987
2008	Rp.2.598.765.569
2009	Rp. 3.356.986.785

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan)

Tabel 4

Target Penerimaan Kas Negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan
(Dalam Milyar)

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan kas negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan karena penerimaan pemerintah yang berasal dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang sangat dominan, penting dan potensial untuk membiayai proses pembangunan, yang sejak lama menempuh kebijaksanaan yang seimbang dalam anggaran, yang berarti pengeluaran pembangunan dibuat sama dengan penerimaannya.

4. Jumlah tunggakan pajak yang dapat diselesaikan dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.

No.	Bulan	Jumlah Jurusita	Penyampaian Surat Paksa		
			Realisasi	Standart	%
1	Januari	1		15	
2	Februari	3		45	
3	Maret	3	20	45	44
4	April	3	40	45	89
5	Mei	3	40	45	89
6	Juni	3	153	45	340
7	Juli	3	144	45	320
8	Agustus	3	141	45	313
9	September	3		45	
10	Oktober	2	3	30	10
11	November	2	66	30	
12	Desember	2	60	30	
	Jumlah	-	667	465	133

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan)

Tabel 5

Kegiatan Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2009

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa kegiatan penagihan utang pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan pengaruh yang besar bagi penerimaan kas negara serta wajib pajak/ penanggung pajak untuk membayar utang pajaknya kedalam kas negara. Hal tersebut dibuktikan dalam kolom persentase dan pencapaian realisasi yang melebihi dari standar pencapaian dari penyampaian Surat Paksa yang diharuskan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.

5. Hasil Kuesioner Pernyataan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dalam Pelaksanaan Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak

Berdasarkan dari 30 Responden yang berasal dari wajib pajak/ penanggung pajak perorangan/ pribadi dan badan hukum dan semuanya mengembalikan kuesioner, maka diperoleh jawaban sebagai berikut :

Responden	Setuju	Tidak Setuju	Ragu-ragu
Wajib Pajak Orang Pribadi	10	3	2
Wajib Pajak Badan	3	9	3

Tabel 6
(Sumber: Data Primer yang diolah, 2010, Oktober)

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa wajib pajak/ penanggung pajak orang pribadi, sebanyak 10 responden (66,67 %) menjawab setuju, sisanya 3 responden (20,33%) menjawab tidak setuju dan 2 responden menjawab ragu-ragu (13%). Sedangkan untuk wajib pajak/ penanggung pajak badan sebanyak 9 responden (60 %) menjawab setuju, sebanyak 3 responden (20 %) menjawab tidak setuju dan sisanya sebanyak 3 responden (20%) menjawab ragu-ragu.

BAB III
HAMBATAN-HAMBATAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM
MELAKUKAN PENAGIHAN UTANG PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
TERHADAP PENANGGUNG PAJAK

A. Hambatan-hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak.

Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan oleh fiskus sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak/ penanggung pajak agar melunasi utang pajaknya. Tindakan tersebut merupakan perwujudan dari alat paksa yang dimiliki oleh negara dan yang diatur dalam hukum pajak. Namun, di dalam pelaksanaannya tidaklah semudah yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan Jurusita Pajak sebagai pelaksana penagihan pajak menjumpai beberapa hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan jalannya proses penagihan pajak terhadap wajib pajak/ penanggung pajak tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun hambatan-hambatan dalam penagihan utang pajak dengan Surat Paksa terhadap wajib pajak/ penanggung pajak, yaitu: ²⁶

1. Alamat wajib pajak/ penanggung pajak yang berubah-ubah dan tidak dimutakhirkan oleh wajib Pajak/ penanggung pajak yang bersangkutan.
2. Wajib pajak/ penanggung pajak menolak Surat Paksa.
3. Jurusita tidak menjumpai wajib pajak/ penanggung pajak.
4. Jurusita Pajak mendapatkan perlawanan dari wajib pajak/ penanggung pajak.

²⁶ Wawancara dengan Decky Prihatama, Jurusita Pajak, Sub.bagian Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan, tanggal 9 Desember 2010.

5. Wajib pajak/ penanggung pajak sedang mengajukan keberatan atau banding.

B. Upaya Penyelesaian dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak.

1. Pemberitahuan penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap wajib pajak/ penanggung pajak tidak selalu dapat dilakukan dengan lancar. Salah satunya penyebabnya yaitu dikarenakan tidak diketahuinya tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian salinan Surat Paksa tersebut dilakukan dengan cara menempelkannya pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, dan mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah. Menurut ketentuan tersebut, Jurusita Pajak dapat memuat salinan Surat Paksa ke media massa dan menitipkannya di papan pengumuman Kantor Pemerintahan Daerah setempat.
2. Adakalanya wajib pajak/ penanggung pajak menolak untuk menerima Surat Paksa yang disampaikan oleh Jurusita Pajak dengan berbagai macam alasan. Apabila alasan penolakan tersebut dikarenakan tunggakan menurut Surat Paksa berbeda dengan tunggakan SKP yang dimiliki oleh wajib pajak/ penanggung pajak, maka Jurusita Pajak tidak boleh mengubah, apa yang tertulis dalam Surat Paksa tersebut ataupun mencoret dan menambahkan pembetulannya.

Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara Jurusita Pajak mengembalikan Surat Paksa tersebut kepada Kepala Seksi Penagihan dengan disertai laporan dan usul agar dikeluarkan Surat Paksa yang baru dengan menggunakan nomor dan tanggal yang sama (pengganti Surat Paksa yang salah tersebut) sesuai dengan data sebenarnya. Hal tersebut dapat dilakukan pula atas kesalahan/ perbedaan-perbedaan alamat, perbedaan nama dan lain sebagainya.

3. Apabila Jurusita Pajak tidak menjumpai wajib pajak/ penanggung pajak maka salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan/ diberikan kepada :
 - a. Keluarga wajib pajak/ penanggung pajak atau orang bertempat tinggal bersama dengan wajib pajak/ penanggung pajak yang akil baliqh (dewasa dan sehat mental).
 - b. Anggota Pengurus Komisaris atau para persero dari Badan Usaha yang bersangkutan atau;
 - c. Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/ Walikota/ Camat/ Lurah) dalam hal mereka tersebut dalam butir a dan b di atas juga tidak dijumpai.
4. Apabila dalam pelaksanaan penyampaian Surat Paksa, Jurusita Pajak menemui persoalan/ hambatan yang berasal dari wajib pajak/ penanggung pajak berupa penolakan bahkan perlawanan kepada Juruista Pajak, maka penyelesaiannya permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan koordinasi atau meminta bantuan

pihak Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

5. Dalam hal wajib pajak/ penanggung pajak menolak menerima Surat Paksa dengan alasan ada kesalahan dalam Surat Paksa (misalnya nama dan alamat wajib pajak/ penanggung pajak tidak benar), maka penyelesaiannya Surat Paksa tersebut harus diperbaiki. Namun, apabila alasan penolakan karena wajib pajak/ penanggung pajak sedang mengajukan keberatan atau banding, maka Surat Paksa dapat diberikan pada wajib pajak/ penanggung pajak. Akan tetapi bila wajib pajak/ penanggung pajak tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas, maka Surat Paksa itu ditinggalkan saja, dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan/ disampaikan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku dan memberikan pengaruh yang besar dalam pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak/ penanggung pajak terhadap penerimaan kas negara.
2. Dalam pelaksanaan Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan ditemui beberapa hambatan, di antaranya karena :
 - a. Alamat wajib pajak/ penanggung pajak yang berubah-ubah dan tidak dimutakhirkan oleh wajib Pajak/ penanggung pajak yang bersangkutan;
 - b. Wajib pajak/ penanggung pajak menolak Surat Paksa;
 - c. Jurusita pajak tidak menjumpai wajib pajak/ penanggung pajak;
 - d. Jurusita pajak mendapatkan perlawanan dari wajib pajak/ penanggung pajak;
 - e. Wajib pajak/ penanggung pajak sedang mengajukan keberatan atau banding.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan, adalah sebagai berikut :

1. Agar kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak/ penanggung pajak berjalan dengan maksimal, diharapkan aparat pajak (*fiskus*) senantiasa melakukan ekstensifikasi pajak melalui penyisiran, pengumpulan data dan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap para pelaku pajak baik wajib pajak/ penanggung pajak maupun aparat pajak itu sendiri.
2. Melakukan perbaikan secara internal melalui peningkatan kinerja aparat di bidang pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan sehingga dapat mampu melakukan tugas pengawasan dan pembinaan di bidang perpajakan sesuai asas (*self asssestment*) kepada wajib pajak/ penanggung pajak.
3. Perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi secara terus menerus dan terintegrasi mengenai pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan nasional terhadap wajib pajak/ penanggung pajak atau masyarakat yang suatu saat berpotensi menjadi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hadi, H. Moeljo, *Dasar-Dasar Peangihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Lubis, Irwansyah, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2010.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2009
- Saidi, Muhammad Djafar, *Pembaruan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Siahaan, Marihot P., *Hukum Pajak Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- , *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- , *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1992.
- Valentina, Sri, *Perpajakan Indonesia*, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Citra Media Wacana, Jakarta, 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Citra Media Wacana, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Citra Media Wacana, Jakarta, 2008.

C. HANDOUT MATA KULIAH DAN ARTIKEL

Rini, Indrarti, *Handout Metodologi Penelitian Hukum*, FH UPN, 2007

D. WEBSITE

<http://www.legalitas.org/database/staatsblad/stb52-1847.pdf>, diakses pada hari kamis, 09 Desember 2010, 08.00 wib.